

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG

ABU BAKAR IBRASA



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ABU BAKAR IBRASA
A31107015**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG

disusun dan diajukan oleh

ABU BAKAR IBRASA
A31107015

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

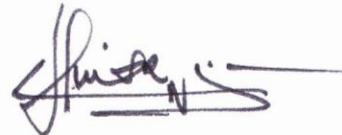
Makassar, 27 Juni 2013

Pembimbing I



Drs. Moh. Cristian Mangiwa, M.Si, Ak
NIP 195811101987101001

Pembimbing II



DR. Yohanis Rura, SE, M.SA, Ak
NIP 196111281988111001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Kartini, SE, M.Si., Ak.
NIP 196503051992032001

SKRIPSI

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG

disusun dan diajukan oleh

ABU BAKAR IBRASA
A31107015

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **16 Januari 2014** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA	Ketua	1.
2. Dr. Yohanis Rura, SE, M.SA, Ak., CA	Sekretaris	2.
3. Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA	Anggota	3.
4. Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si, Ak., CA	Anggota	4.
5. Drs. Deng Siraja, M.Si., Ak., CA	Anggota	5.

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, SE, M.Si, Ak., CA
NIP 19650305 199203 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Abu Bakar Ibrasa

NIM : A31107015

jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

“Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang”

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Januari 2014

Yang membuat pernyataan,



Abu Bakar Ibrasa

PRAKATA

Puji syukur hamba haturkan kepada Zat Yang Maha Suci, Allah SWT., sebab yang memiliki segala ke-Maha-an dan sumber dari segala keberadaan yang dari padanya pemilik dari segala kepemilikan yang ada sehingga hanya kata inilah yang bisa menggambarkan wujud suci-Nya walaupun tidak mampu sampai pada hakikat-Nya, yang senantiasa mencurahkan anugrah-Nya kepada hamba-hamba-Nya.

Shalawat dan taslim kepada Sang kekasih Allah, Pembawa Risalah Suci, sebagai hakikat insan kamil manusia suci, sebagai khalifatul fill ardh seluruh alam semesta, yang dengannya melakukan penyadaran intelektual, pencerahan cahaya iman, serta revolusi berpikir terhadap seluruh umat manusia. Juga kepada keluarganya yang suci dan sahabatnya.

Salah satu bentuk kesyukuran kepada Sang Khalik adalah mensyukuri apa yang telah diperadakannya, mahluk pun ada karena kebesaran-Nya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Ibrahim Suasa, BA dan Ibunda Maradang, S yang selama ini dalam setiap tarikan nafasnya memberikan dorongan motivasi, dukungan materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada saudara-saudariku yang senantiasa mensupport ketika terdapat kendala atau hambatan dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Moh. Cristian Mangiwa, M.Si, Ak dan Bapak DR. Yohanis Rura, SE, M.SA, Ak sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan selama proses bimbingan. Tanpa bantuan dari beliau maka penelitian ini akan terhambat. Juga kepada Bapak Dr. Darwis Said, SE., M.SA., Ak sebagai

penasehat akademik yang selama ini menasehati dalam bidang akademik sehingga bisa mencapai tahap akhir.

Kemudian ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Kadir pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan yang selama dalam penelitian memberikan informasi-informasi terkait penelitian tersebut sehingga bisa dirampungkan sampai selesai. Juga kepada Drs. Latief sebagai kepala bidang penerimaan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang memberikan masukan serta saran selama penelitian berlangsung.

Juga kepada kawan-kawan seperjuangan saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2007 yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian juga kepada kakanda-kakanda di HPMM yang selama ini mengingatkan untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Selanjutnya kawan-kawan seperjuangan di HPMM yang ikut membantu dalam diskusi-diskusi sehingga membantu dalam penyelesaiannya. Tak lupa juga adik-adik saya di HPMM Komisariat Universitas Hasanuddin yang ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian tugas akhir. Terkhusus untuk sahabat-sahabat saya di Asrama HPMM terutama di kamar A9 (Muh. Bahrul Amir, Wahyuddin Tahir, Romy Raff, Muhammad Khaidir Az Zahra, Munawir) yang dalam kesehariannya selalu bertukar pikiran dalam setiap persoalan yang ada serta rekan-rekan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu per satu pada kesempatan ini, harapan peneliti semoga apa yang telah dibantu dalam bentuk apapun mendapatkan pahala dari Sang Pemilik Kesempurnaan, Allah SWT dan juga memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Amin.

Wassalamu Alaikum Wawahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Januari 2014

Abu Bakar Ibrasa

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang

Abu Bakar Ibrasa
Cristian Mangiwa
Yohanis Rura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan metode analisis data. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari acuan atau literatur yang berhubungan dengan materi dan dokumen yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah memberikan pemasukan 1-2% dalam lima tahun terakhir. Kemudian dari faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang seperti fasilitas, lokasi, sumber daya manusia, kesadaran wajib retribusi, transaksi di luar pasar, dan pengelolaan pasar masih tradisional.

Kata kunci : retribusi pasar, kontribusi, pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

Analysis factor's that effecting on acceptance local retribution in Enrekang District

Abu Bakar Ibrasa
Cristian Mangiwa
Yohanis Rura

Analysis of the factors that influence acceptance in the market levy Enrekang District This study aims to determine the contribution of market acceptance of retribution against local revenues and analyzes the factors that influence acceptance in the market levy Enrekang District. The data obtained from this study data from relevant departments and several observations and interviews directly to the parties directly involved in it. This study is a descriptive study with a data analyzes method. This type of data consists of primary data obtained directly from study sites through interviews with informants related to the research problem, and also through direct observation of the object of research. While the secondary data obtained from literature references or related materials and documents obtained from Enrekang District, as well as scientific papers related to research. To analyze the data obtained by the writer uses descriptive quantitative data analysis. The study findings suggest that the contribution of market acceptance of retribution against local revenues to provide income 1-2% in the last five years. Then of the factors that influence acceptance in the market levy Enrekang District such facilities, location, human resources, awareness of compulsory levies, transactions outside of the market, and is still a traditional market management.

Keyword : market levies, contributions, local revenue.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Batasan Masalah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Otonomi Daerah	11
2.2 Desentralisasi Fiskal	12
2.3 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	14
2.4 Pendapatan Asli Daerah	16
2.4.1 Pajak Daerah	17
2.4.2 Retribusi Daerah	19
2.4.3 Bagian Laba Perusahaan Daerah	22
2.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu	23
2.6 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Rancangan Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.3.1 Jenis Data	30
3.3.2 Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Model Analisis Data	31
3.5.1 Metode Deskriptif Kuantitatif	31

3.5.2	Metode Wawancara	32
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	33
4.1	Keadaan Geografis Kabupaten Enrekang.....	33
4.2	Gambaran Tempat Penelitian.....	34
4.2.1	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	34
4.2.2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	38
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang.....	49
5.1.1	Aparat yang Terlibat Dalam Pemungutan Retribusi Pasar	51
5.1.2	Fasilitas yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang ..	57
5.1.3	Besarnya Tarif Retribusi di Kabupaten Enrekang	57
5.1.4	Faktor-faktor Penunjang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang	58
5.1.5	Kendala-kendala atau Hambatan-hambatan yang didapatkan Dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang	60
5.2	Kontribusi Retribusi Pasar Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.....	61
5.3	Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Enrekang.....	72
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
6.1	Kesimpulan	74
6.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN.....		79

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2011	6
4.1	Kondisi dan Jumlah Pasar yang ada di Kabupaten Enrekang	46
5.1	Klasifikasi Pasar Berdasarkan Kecamatan	61
5.2	Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar Per Kecamatan Kabupaten Enrekang dari Tahun 2007-2011	66
5.3	Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Enrekang dari Tahun 2007-2011	68
5.4	Kontribusi Retribusi Pasar Per Kecamatan Terhadap Total Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2007-2011	70
5.5	Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Total Penerimaan di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2007-2011	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	29
3.1 Formula untuk Mengestimasi Besarnya Kontribusi PAD	32
5.1 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang.....	51
5.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1) Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 12	
2) Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2002 Nomor 5	
3) Pengumuman Perubahan Tarif Retribusi Pasar	
4) Surat Perjanjian	
5) Surat Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antar pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, otonomi adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Seiring diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai potensi dan kapasitas daerah masing-masing.

Setiap daerah diberikan kebebasan untuk mencari sumber penerimaan daerahnya sendiri yang dapat mendukung anggaran pengeluaran daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - d) lain-lain PAD yang sah.
2. dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan

sumber daya alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari :

- 1) sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- 2) penerimaan pinjaman daerah;
- 3) dana cadangan daerah; dan
- 4) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, setiap daerah dituntut untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya. Salah satu sumber pembiayaan daerah yang dapat diandalkan adalah dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat

sesuai peraturan hukum dan perundang-undangan yang jelas dan kuat untuk membiayai pembangunan daerah.

Kabupaten Enrekang dikenal sebagai daerah penghasil Hortikultura. Truk-truk mendistribusikannya ke berbagai daerah di Sulsel dan Pulau Sulawesi, hingga provinsi lain, seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Jenis komoditas hortikultura yang diantar pulaukan biasanya yang tidak cepat busuk atau layu, seperti bawang merah, kacang merah, kentang, dan wortel. Aktivitas bercocok tanam perlahan-lahan kembali menggeliat ketika Pemkab Enrekang membangun STA seluas 2 hektar pada tahun 2006 dengan bantuan APBN sebesar Rp 1 miliar. STA yang khusus melayani penjualan grosir komoditas hortikultura itu menampung hasil panen dari berbagai sentra penghasil di Enrekang, seperti Baroko, Alla, Masalle, dan Anggeraja.

Kepala STA Sumillang (Aswin Rizal Harahap, 2011), Muhammad Ichsan, mengatakan, sebanyak 18 jenis komoditas hortikultura diperjualbelikan di pusat agribisnis yang berjarak 35 kilometer dari pusat kota Enrekang. Sembilan jenis di antaranya merupakan komoditas unggul dari Enrekang, yakni kubis, daun bawang, kentang, tomat sayur, tomat buah, bawang merah, cabai merah, wortel, dan kacang merah. Hal ini mengindikasikan bahwa Enrekang memiliki potensi yang besar dengan penghasil Hortikultura.

Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan (Desk Informasi, 2013), meresmikan Pasar Cakke, di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Selasa (19/2). Revitalisasi pasar ini untuk mendukung ketersediaan bahan pokok dan mendorong kelancaran arus barang antar daerah di kawasan tersebut.

Pasar Cakke, kata Mendag Gita Wirjawan, menampung produk unggulan khas daerah untuk promosi. Beberapa produk unggulannya, antara lain Sarabba berupa minuman hangat dari jahe yang dicampur dengan rempah-rempah, dan Dangke yaitu makanan yang terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dikentalkan dan difermentasi, sehingga memiliki tekstur seperti tahu dan rasa seperti keju.

Selain Sarabba dan Dangke, Kabupaten Enrekang juga memiliki Kopi Kalosi sebagai salah satu produk unggulan. Kopi Kalosi merupakan salah satu jenis kopi Arabika terbaik di dunia dan digemari khususnya oleh masyarakat Eropa dan Amerika. “Kopi Kalosi ini ke depan juga harus dipromosikan secara lokal dan nasional, dan terus ditingkatkan produksinya agar tidak punah dari peredaran,” ujar Mendag.

Sebuah hal yang memang patut untuk lebih diperhatikan mengingat ini bisa menjadi hal yang menjanjikan. Namun yang menjadi fenomena di Enrekang ternyata Pendapatan Daerah belum bisa untuk menutupi semua pengeluaran daerah. Bahkan Pendapatan Daerah sebagian besar hanya untuk keperluan gaji pegawai dan hanya sebagian kecil untuk pembangunan daerah. Bahkan Enrekang pernah masuk dalam urutan kedua yang memiliki masyarakat miskin terbanyak di Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah tidak hanya bisa mengharapkan bantuan pemerintah pusat namun harus melakukan terobosan baru yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

Adapun Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun 2007 sampai 2011 bisa dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2011 (juta rupiah).

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	%	Retribusi Daerah	%	Bagian Laba Usaha Daerah	%	Lain-lain PAD yang sah	%	Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2007	1.782.558.042,00	7,70	4.769.188.907,00	20,60	2.563.401.461,60	11,07	14.035.229.826,85	60,63	23.150.378.237,45	100
2	2008	1.848.890.705,00	6,04	7.449.146.747,00	24,35	2.816.356.974,50	9,21	18.474.044.214,00	60,40	30.588.438.640,50	100
3	2009	1.870.593.930,00	6,60	3.868.922.234,00	13,65	2.658.105.133,74	9,38	19.951.162.793,57	70,37	28.348.784.091,31	100
4	2010	1.483.152.466,00	7,61	5.199.718.989,00	26,68	2.827.815.600,91	14,51	9.979.302.501,01	51,20	19.489.989.556,92	100
5	2011	1.910.401.016,00	10,33	3.820.111.363,00	20,66	2.792.133.210,00	15,10	9.964.328.527,91	53,90	18.486.974.116,91	100

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)

Hal di atas merupakan fenomena yang ironis melihat potensi SDA yang dimiliki oleh Enrekang sangat besar. Terlepas dari itu perlu juga diperhatikan mengenai potensi yang belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah Enrekang yaitu retribusi pasar. Terdapat beberapa daerah yang memiliki komoditas penghasil pertanian yang memasok dalam jumlah besar ke pasar seperti Anggeraja, Masalle, Baroko, Baraka dan Buntu Batu. Dari hasil ini diketahui bahwa jumlah yang didistribusikan ke pasar-pasar sangat besar.

Sudah menjadi hal yang wajar dengan banyaknya jumlah hasil pertanian kemudian didukung oleh luas lahan dan faktor alam. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tempat penyimpanan hasil pertanian dalam hal ini pasar yang mendukung agar hasil pertanian tidak cepat busuk, karena pemerintah daerah telah melakukan renovasi terhadap beberapa pasar dan mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Sehubungan dengan ini ada hal perlu lebih dicermati, dengan banyaknya komoditas pertanian yang diperdagangkan dan telah dilakukan perbaikan terhadap beberapa pasar tetapi mengapa retribusinya minim. Apakah karena kurangnya pengontrolan dari pemerintah daerah atau adanya permainan harga dari para pedagang sehingga minimnya retribusi pasar.

Berdasarkan hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga nantinya dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi minimnya retribusi pasar yang diperoleh pemerintah daerah agar dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah maka perlu diperhatikan PAD dan pendapatan lain daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bersifat fisik dan non fisik. Sehubungan dengan ini maka diadakan penelitian mengenai: ***“Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan***

Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang”, dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melihat seberapa besar potensi dan realisasi retribusi daerah beserta faktor-faktor yang memengaruhi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten Enrekang.

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan PAD di Kabupaten Enrekang hampir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun sangat disayangkan kontribusi PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Enrekang masih tergolong rendah. Adapun komponen yang paling dominan terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Enrekang adalah bagian dana perimbangan.

Berdasarkan Tabel 1.1. terlihat bahwa tiap tahunnya retribusi daerah mengalami peningkatan yang tidak signifikan artinya terkadang naik pada tahun sebelumnya tapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan penerimaan PAD dalam rangka peningkatan derajat kemandirian daerah.

Komponen PAD di kabupaten Enrekang yang memberikan kontribusi terbesar adalah lain-lain PAD yang sah. Oleh sebab itu, dalam rangka peningkatan PAD maka perlu dilakukan upaya analisis terhadap penerimaan retribusi daerah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang selama tahun 2007-2011?
2. Berapa besar kontribusi Retribusi Pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang selama tahun 2007-2011?

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi retribusi pasar di Kabupaten Enrekang selama tahun 2007-2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

- a) Mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang selama tahun 2007-2011.
- b) Mengetahui berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang selama tahun 2007-2011.
- c) Memperoleh faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang selama tahun 2007-2011.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi pasar.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian ini hanya berkisar pada salah satu potensi retribusi daerah yaitu pasar yang ketika dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan daerah.
- b. Retribusi pasar menjadi objek penelitian karena untuk mengakomodir hasil-hasil pertanian, pasar harusnya sebagai tempat untuk menampung hasil pertanian namun yang menjadi kendala karena pasar-pasar tradisional yang ada tidak terawat dengan baik bahkan terabaikan.
- c. Mempertimbangkan keterbatasan waktu, sehingga untuk menganalisis jenis retribusi yang lain peneliti merasa bahwa kedepannya akan ada yang melakukan penelitian tentang itu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara bertanggung jawab.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya visi yang jelas serta keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri secara konsisten dan bertanggung jawab. Menurut Rasyid (2005), visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkupnya yang utama, yaitu di bidang politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Dalam bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan

memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta peran aktif dari masyarakat setempat.

Dilaksanakannya otonomi daerah di Indonesia, terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu:

1. terdapat sebagian kegiatan yang lebih efisien bila dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.
3. dengan daerah yang lebih sempit, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien.
4. lebih bervariasi dalam sistem ekonomi dan politik.
5. setiap daerah saling bersaing untuk menjadi lebih baik dari daerah lainnya.

2.2. Desentralisasi Fiskal

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia saat ini telah memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal oleh pemerintah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberlakukan secara efektif sejak bulan Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Pemberlakuan undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk dapat menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah. *Pertama*, desentralisasi fiskal berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang dinamakan dekonsentrasi. *Kedua*, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan

delegasi. *Ketiga*, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah (Bird dan Vaillancourt, 2000).

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi pemerintah pusat.
3. mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Sinaga dan Siregar (2005), desentralisasi fiskal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua tingkat.
2. memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintahan.
3. memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal.
4. memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
5. menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi.

Oleh karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut di atas telah dilaksanakan.

2.3 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Bratakusumah dan Solihin (2003) menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Adapun yang menjadi sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Perimbangan, yaitu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi Khusus.
3. Pinjaman Daerah, yaitu pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
4. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain, bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
5. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain, hibah, Dana Darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dana perimbangan terdiri atas sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) perorangan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) atau sering disebut juga dengan *block grant* yang besarnya didasarkan atas formula.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK identik dengan *special grant* yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya *insidental* dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah (*bottom-up*).

Selain itu, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD. Pinjaman daerah dapat bersumber dari dalam dan luar negeri.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Salamm (2002) menyatakan bahwa bagi daerah, PAD ini jelas sumber dana yang diperoleh berdasarkan inovasi dan kreasi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah yang “rajin” bersama DPRD mencari peluang-peluang baru sebagai sumber pemasukan kas daerah.

2.4.1 Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi dua menurut wilayahnya, yang meliputi Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Pajak Propinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;

- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Saragih (2003), di samping jenis pajak daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah sebagai berikut.

1. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi.
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Potensinya memadai.
4. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2.4.2 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah (Siahaan, 2005). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah: 1) Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang, 2) Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sesuai dengan kewenangan otonominya (Elmi, 2002).

Adapun yang menjadi objek retribusi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dengan demikian, jenis retribusi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dibagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Saragih (2003) menyatakan bahwa perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Namun, banyaknya jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu,

kebijakan retribusi daerah sering menimbulkan kontroversial di daerah, baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah diberlakukan karena terkadang pemda memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain perbedaan tersebut, Siahaan (2005) menyatakan bahwa perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagai berikut.

1. Kontra Prestasinya

Pada retribusi, kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu, sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

2. Balas Jasa Pemerintah

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

3. Sifat Pemungutannya

Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

4. Sifat Pelaksanaannya

Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi.

Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

5. Lembaga atau Badan Pemungutnya

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.4.3 Bagian Laba Perusahaan Daerah

Menurut Elmi (2002), selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan milik daerah seperti kelemahan manajemen, masalah kepegawaian dan terlalu banyak campur tangan pejabat daerah dan sebagainya, telah menyebabkan kebanyakan perusahaan daerah berjalan tidak efisien. Dalam menghadapi beban dan kurang mandiri, sehingga kebanyakan merugi dan menjadi beban APBD. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Menurut teori ada tiga kiat dalam memilih bidang usaha yang dapat membantu mengembangkan perusahaan daerah. *Pertama*, harus ada pemisahan antara pembuat kebijaksanaan (eksekutif) dengan bagian keuangan agar menghasilkan pelayanan yang efisien. Maksudnya memberikan keleluasaan kepada para eksekutif dalam membuat kebijakan penentuan harga, produksi dan

pegawai dan sebagainya. Sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. *Kedua*, produk yang dihasilkan harus laku dijual, berkualitas baik dan bermanfaat sebagai *private good*. *Ketiga*, cara menetapkan harga harus didasarkan pada hubungan antara biaya produk dengan harga jual kepada konsumen perorangan. Dengan demikian perusahaan daerah minimal dapat mencapai kondisi *break even* dan selanjutnya dapat memperoleh keuntungan, misalnya perusahaan jalan tol.

2.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengertian penerimaan lain-lain pada dasarnya merupakan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan laba perusahaan daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komponen lain-lain PAD yang sah terdiri dari hibah, penjualan aset daerah, jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, angsuran atau cicilan kendaraan bermotor, sumbangan dari perum jasa raharja dan rupa-rupa pendapatan (Yanti, 2004).

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Astuti E.P. (2006 : 64) menulis tentang retribusi pasar dalam pendapatan asli daerah kota makassar (kasus pasar regional daya), diperoleh hasil penelitian bahwa retribusi pasar regional daya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Makassar selama tahun anggaran 2001/2002 hingga tahun anggaran 2005/2006 rata-rata realisasi penerimaan setiap tahunnya adalah 21,3%. Adapun kontribusi pasar regional daya terhadap retribusi pasar tahun anggaran 2001/2002 sampai tahun anggaran 2005/2006 rata-rata 16,7%,

sedangkan retribusi pasar terhadap retribusi daerah kota Makassar selama 5 tahun terakhir ini rata-rata 5,1%.

Dalam sebuah penelitian yang lain, (Nelly ; 2001: 67) menulis tentang pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota Pare-Pare, diperoleh hasil kontribusi pendapatan asli daerah total penerimaan pendapatan asli daerah kota Pare-Pare sebesar 21,67% per tahun. Untuk retribusi daerah, kontribusi terhadap PAD per tahun sebesar 63,79%. Sedangkan kontribusi dalam APBD yaitu untuk pajak daerah rata-rata sebesar 2,65% per tahun dan retribusi daerah 7,95% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan APBD masih relatif kecil dibanding dengan kontribusi retribusi daerah.

Dewanto (2001), mengadakan penelitian tentang retribusi pasar di Kabupaten Banyumas. Dewanto menyimpulkan bahwa efektifitas rata-rata retribusi pasar di Kabupaten Banyumas adalah 105,28 persen. Angka ini menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, yang sekaligus menandakan bahwa target penerimaan yang selama ini ditetapkan masih berada di bawah potensi penerimaan retribusi pasar.

Kambu (2000), juga mengadakan penelitian tentang potensi dan proyeksi retribusi pasar di Kota Jayapura. Kambu mencatat adanya perbedaan efektivitas dalam hal penerimaan retribusi pasar, bila menggunakan potensi dan target penerimaan sebagai dasar perhitungan Indeks Kinerja Penerimaan (IKP). Dengan dasar potensi, IKP menunjukkan ketidakefektifan pemungutan retribusi pasar, sementara jika target dijadikan dasar perhitungan, maka pemungutan retribusi pasar menjadi efektif.

Santoso (1995), meneliti tentang peranan retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Aspek yang dikaji adalah tentang

elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB dan jumlah penduduk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retribusi pasar memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap PDRB dan jumlah penduduk.

Downing (1992), meneliti tentang potensi beberapa jenis retribusi daerah di beberapa kota di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang bisa meningkatkan penerimaannya hingga mencapai angka 400 persen. Menurut Downing, retribusi daerah tetap merupakan peluang yang menjanjikan bagi peningkatan pendapatan daerah.

Miller dan Russek (1997), meneliti tentang hubungan struktur fiskal pemerintah negara bagian, pemerintah lokal dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pajak negara dan daerah memberikan pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika penerimaan yang ada digunakan untuk membiayai pembayaran transfer, tetapi hal ini tidak terjadi jika penerimaan yang ada digunakan untuk membiayai pelayanan publik.

Kim (1997), meneliti tentang peranan sektor publik lokal dalam pertumbuhan ekonomi regional di Korea. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi regional sangat signifikan. Pajak daerah dan penerimaan bukan pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional, sementara investasi dan konsumsi pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka diberlakukanlah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Inti dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Tabel 1.1. penerimaan daerah terdiri dari Bagian Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Laba Usaha Daerah, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perkembangan PAD beserta komponennya selama

tahun 2007-2011 dan seberapa besar kontribusi PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Enrekang.

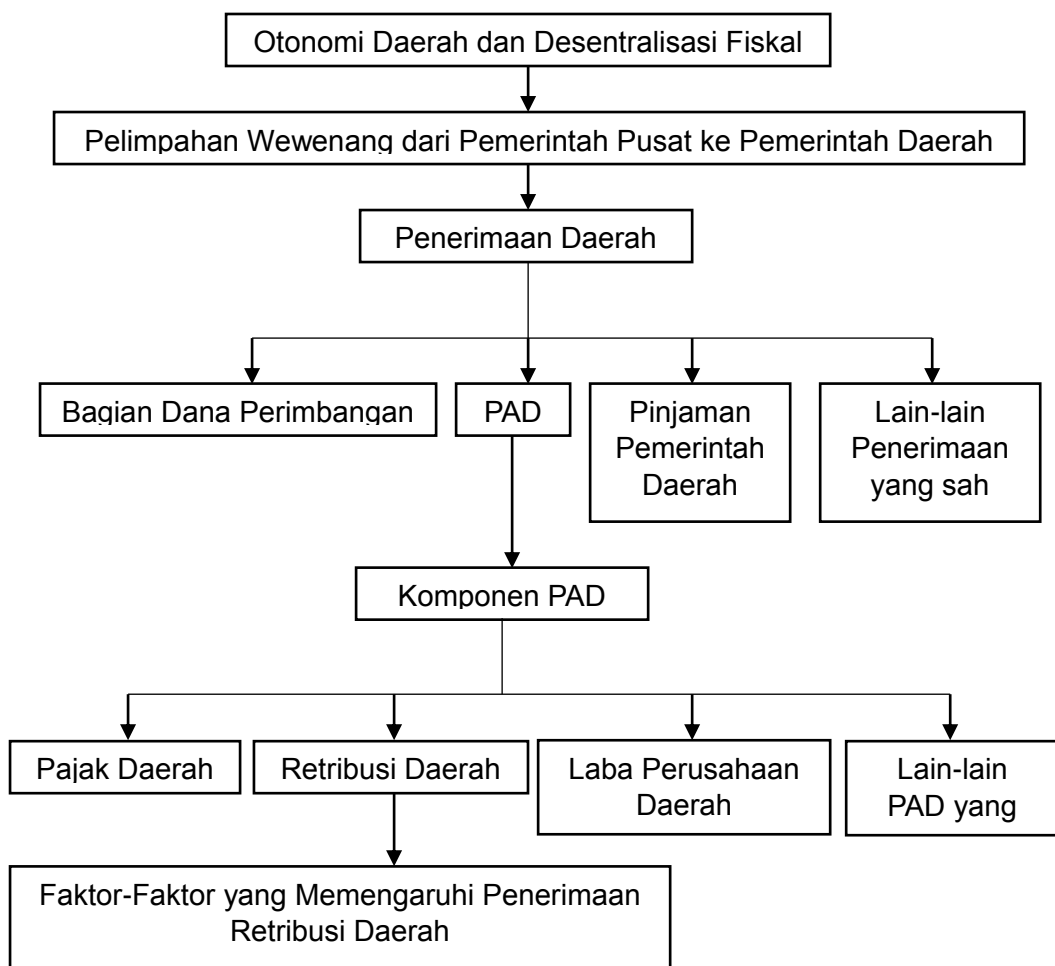
Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai potensi dan kapasitas daerah masing-masing. Dengan demikian, setiap daerah dituntut untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya. Salah satu sumber pembiayaan daerah yang dapat diandalkan adalah dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu, maka penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan penelusuran mengenai potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang serta merujuk dari teori, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur terkait lainnya, maka diperoleh variabel-variabel dasar yang digunakan dalam analisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II, yakni pemerintah daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan. Merujuk dari teori tersebut, maka variabel dasar yang digunakan dalam analisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah dalam penelitian ini adalah Jumlah Hotel dan Penginapan (JHTLP), Jumlah Restoran (JRST), Jumlah Tempat Hiburan

(JHBR), Jumlah Pemasangan Reklame (JRKLM), Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang (POP), Tingkat Inflasi Kabupaten Enrekang (INF) dan Jumlah Rumah Tangga (JRT).

Tingkat inflasi diduga memengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang. Menurut Mankiw (2003), inflasi yang parah akan memaksa perusahaan untuk lebih sering mengubah harga, dan hal ini akan menelan biaya. Misalnya sebuah restoran yang harus mencetak daftar menu baru dengan harga yang baru pula. Biaya ini disebut biaya menu (menu cost), karena semakin tinggi inflasi, maka akan semakin sering restoran atau kafe mencetak daftar menu baru. Selain itu, inflasi menyebabkan adanya biaya yang timbul dari undang-undang pajak. Banyak penerapan tarif pajak yang tidak memperhitungkan inflasi. Inflasi dapat mengubah kewajiban pajak perorangan dalam cara yang tidak diperhitungkan pembuat undang-undang.

Inflasi memiliki dua dampak yang berbeda bagi produsen. Jika keuntungan masih lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi, maka inflasi menguntungkan, dan mereka akan menambah produksinya sehingga keuntungan bertambah. Hal ini biasanya terjadi pada pengusaha besar, tetapi jika keuntungan yang didapat lebih rendah dari kenaikan biaya produksi, mereka bisa menurunkan produksinya atau bahkan menghentikan produksinya. Hal ini biasanya terjadi pada pengusaha kecil (Wikipedia Indonesia, 2007). Atas dasar teori-teori tersebut, maka pada penelitian ini variabel tingkat inflasi dimasukkan sebagai salah satu faktor yang diduga memengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menghitung berapa besar kontribusi penerimaan pasar terhadap penerimaan daerah. Kemudian memberikan gambaran secara jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Retribusi Pasar yang nantinya akan dianalisis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam pengambilan kebijakan.

3.2 Tempat dan Waktu

Tempat melakukan penelitian adalah di daerah Kabupaten Enrekang. Dari daerah ini diperoleh data sebagai bahan analisis. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan, maka digunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut.

- a. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara pada dinas-dinas yang terkait untuk memperoleh informasi tentang:
 1. kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.
 2. upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah tersebut.
- b. Data sekunder yang diperoleh dari pihak ketiga seperti dokumen tertulis serta catatan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari Kantor dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, daerah tingkat II Enrekang, dari Kantor statistik daerah tingkat II Enrekang, serta Instansi-instansi terkait yang dapat menunjang untuk berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini serta dari pasar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Metode kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian ini dilakukan melalui kepustakaan untuk memperoleh landasan teori terkait penelitian ini dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang ada hubungannya topik ini.
- b. Metode lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dalam usaha memperoleh data untuk menunjang penelitian ini, sehingga dilakukan penelitian lapangan pada berbagai instansi terkait yang dapat mendukung penelitian ini.

3.5 Model Analisis Data

3.5.1. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode ini digunakan untuk melihat dan membandingkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah serta kontribusi komponen PAD terhadap total penerimaan PAD dari waktu ke waktu dalam suatu series data selama periode tahun 2007-2011, dengan melihat indeks perkembangannya baik dari segi besaran maupun perkembangannya. Adapun formula yang dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya kontribusi penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Analisis ini juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi komponen PAD terhadap total penerimaan PAD.

3.5.2. Metode Wawancara

Metode ini digunakan untuk mewawancarai secara mendalam terhadap instansi-instansi terkait mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi total penerimaan daerah serta responden di lapangan yang nantinya bisa memberikan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan kemudian akan dianalisis untuk nantinya akan disimpulkan selama periode tahun 2007-2011.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Enrekang

Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian ± 3.000 meter di atas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah timur sedang disebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara ke selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Enrekang terletak antara $3^{\circ} 14'36''$ LS dan $119^{\circ}40'53''$ BT. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km.

Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang, sebagai berikut.

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang
4. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang.

VISI :

"Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada Tahun 2028"

MISI :

1. Mewujudkan konsep pembangunan daerah agropolitan;
2. Mewujudkan kemandirian daerah;
3. Mengembangkan berbagai produk pertanian komoditas unggulan berbasis Ekonomi Masyarakat dan berorientasi pasar;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan.

4.2 Gambaran Tempat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ada dua lokasi yang ditempati melakukan penelitian pertama, Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) dan kedua, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Keduanya menjadi tempat penelitian karena kantor DPKAD sebagai tempat masuknya seluruh hasil dari retribusi pasar dan Kantor Kuperindag sebagai dinas yang mengelola ke lapangan bahkan sampai pemungutan.

4.2.1 Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah

Tujuan

Tujuan yang merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi Misi serta didasarkan pada isi-isu dan analisis stratejik. Tentunya menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Tujuan diharapkan dapat mengarahkan pada rumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah “Menghasilkan rumusan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah demi terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dengan pengendalian keuangan daerah dan administrasi yang mantap”.

Visi

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tujuan masyarakat akan pelayanan prima sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan, perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan atau manfaat.

Visi yang merupakan cara pandang jauh ke depan tentang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang akan diarahkan dan apa yang

akan dicapai. Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan”

Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan atau dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dari pernyataan misi diharapkan seluruh Pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan pengelola Keuangan daerah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Enrekang secara khusus dan penyelenggaraan Negara secara Umum. Misi sesuai tugas pokok dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi, oleh karena itu Misi Badan pengelola Keuangan daerah Kabupaten Enrekang adalah

“Mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh penatausahaan yang tertib serta meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah”.

Strategi

Untuk menentukan strategi yang tepat sehingga mencapai tujuan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan menyebarkan misi

BPKD, perlu dilakukan analisis lingkungan strategi (Analisa lingkungan internal dan External). Untuk itu langkah – langkah untuk mencapai tujuan:

1. Diharapkan dapat menguasai tugas pokok dan fungsi dari masing – masing bidang.
2. Diharapkan adanya kerja sama antar bidang dan sub bidang.
3. Sarana dan prasarana administrasi dalam pengelolaan keuangan memadai.
4. Peraturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan tersedia.
5. Diharapkan supaya terciptanya budaya dan motivasi kerja yang tinggi.

Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPKAD sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, DPKAD Kabupaten Enrekang memiliki aparatur sampai dengan saat ini berjumlah 53 orang pegawai yang terdiri dari:

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS.
 - a) Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

- b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
- c) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3. KEPALA BIDANG PENERIMAAN
 - a) Kepala Seksi Pajak dan Retribusi
 - b) Kepala Seksi Dana Perimbangan
 - c) Kepala Seksi Pelaporan
- 4. KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN VERIFIKASI
 - a) Kepala Seksi Akuntansi
 - b) Kepala Seksi Verifikasi
 - c) Kepala Seksi Pelaporan

- 5. KEPALA BIDANG PENGELUARAN
 - a) Kepala Seksi Anggaran
 - b) Kepala Seksi Perbendaharaan
 - c) Kepala Seksi Pelaporan.
- 6. KEPALA BIDANG ASET
 - a) Kepala Seksi Inventarisasi
 - b) Kepala Seksi Persertifikatan Aset
 - c) Kepala Seksi Neraca Aset

4.2.2 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

VISI

Dalam rangka menata dan mengembangkan perekonomian yang merupakan bagian integral pembangunan Kabupaten Enrekang, maka Visi Dinas

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sebagai berikut.

“Terwujudnya perekonomian yang berbasis agro yang berdaya saing
tahun 2013”

Rumusan Visi mengandung makna sebagai berikut.

1. Terwujudnya adalah ada hasil kinerja baik dari segi perekonomian masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit yang menunjukkan peningkatan atau perbaikan dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan.
2. Perekonomian adalah merupakan indikator perbaikan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya laju pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang.
3. Agro dalam artian pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, pusat pemukiman masyarakat petani yang tumbuh dan berkembang untuk melayani pengembangan pertanian dan mendukung utama gerakan agribisnis dan agro industri.
4. Berdaya saing dalam arti bahwa sumberdaya manusia mampu bersaing atau mampu memproduksi produk-produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul, dapat berkompetisi dengan produk dari luar, mampu mengangkat dan menonjolkan keunggulan dari hasil pembangunan selama ini sehingga lebih baik dari daerah lainnya.

MISI

Misi adalah peran yang harus diemban atau dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, sekaligus menjadi acuan pokok bagi kerangka dan pola pengembangan kegiatan serta menjadi tuntutan operasional tentang hal yang ingin dilaksanakan. Maka rumus Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sebagai berikut.

1. Memberdayakan Pengusaha Kecil dan Menengah dan Koperasi menjadi pelaku Ekonomi yang tangguh dan professional dengan semangat kerakyatan.
2. Meningkatkan peranan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi dalam kegiatan agribisnis, agroindustri, industri manufaktur dan jasa.
3. Mengembangkan pola kemitraan jaringan usaha dan informasi dalam rangka penguasaan pasar dan peningkatan daya saing.
4. Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang bergerak di Bidang Koperasi, UKM, Industri serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investor asing dan domestik untuk melakukan investasi dengan pola kemitraan.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Misi tersebut di atas, maka tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 5 tahun (2009-2013) adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan sumber daya alam melalui pemberdayaan pelaku usaha baik Koperasi, UKM, Industri dalam pemanfaatan teknologi sesuai potensi yang dimiliki.
2. Mengembangkan keunggulan komoditas dan produktifitas berdaya saing tinggi berbasis masyarakat.

3. Menjadi penggerak masyarakat dalam melakukan usaha produksi di bidang industri pengolahan/manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan mampu berdaya saing.
4. Mengembangkan perekonomian berbasis masyarakat diikuti dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai selama penyelenggaraan pelaksanaan tugas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang periode lima tahun adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing kuat, terutama para pelaku usaha yang mengelola Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan.
2. Terwujudnya keunggulan komoditas dan produktifitas berdaya saing tinggi berbasis masyarakat melalui pendekatan pembangunan agropolitan.
3. Terwujudnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sebagai penggerak dalam melakukan usaha produksi dibidang industri pengolahan/manufaktur yang berdaya saing.
4. Berkembangnya sistem perekonomian masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan sarana prasarana penunjang ekonomi kerakyatan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Enrekang Nomor 18 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a) Penyelenggaraan dan pembinaan kesekretariatan dinas;
- b) Penyelenggaraan dan pembinaan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan dibidang pengelolaan pasar;
- d) Penyelenggaraan dan pembinaan pengolahan pasar.
- e) Penyelenggaraan dan pembinaan dibidang usaha kecil dan menengah.

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan, perencanaan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan perencanaan umum;
- b. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan keuangan.

2.1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan perencanaan dinas.

2.2) Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga dinas.

2.3) Sub Bagian keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Penatausahaan Administrasi Keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di sub bagian serta membuat laporan secara berkala.

3. Kepala Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang perindustrian.

3.1) Seksi Industri Pangan

Seksi Industri Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang industri pangan.

3.2) Seksi Industri logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan

Seksi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan.

3.3) Seksi Sandang dan Kerajinan

Seksi Sandang dan Kerajinan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang industri sandang dan kerajinan.

4. Kepala Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang perdagangan.

4.1) Seksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Seksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang peningkatan produk dalam negeri.

4.2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang pengawasan barang beredar dan jasa.

4.3) Seksi Meteorologi dan Perlindungan Konsumen

Seksi Meteorologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen.

5. Kepala Bidang Pengelola Pasar

Bidang Pengelola Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dibidang pengelola pasar.

5.1) Seksi Pengembangan Pasar

Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang pengembangan pasar.

5.2) Seksi Retribusi

Seksi Retribusi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang retribusi.

5.3) Seksi Pengamanan dan Kebersihan Pasar

Seksi Pengamanan dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang pengamanan dan kebersihan pasar.

6. Kepala Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dibidang koperasi.

6.1) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi

Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang pembinaan usaha koperasi.

6.2) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi

Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang organisasi dan tata laksana koperasi.

6.3 Seksi Pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi

Seksi Pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang pendaftaran dan badan hukum koperasi.

7. Kepala Bidang UKM

Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dibidang usaha kecil dan menengah.

7.1) Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan

Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang permodalan dan jasa keuangan.

7.2) Seksi Pembinaan UKM

Seksi Pembinaan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang pembinaan UKM.

7.3) Seksi Aneka Jasa

Seksi Aneka Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang aneka jasa.

Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Enrekang masih terbatas, kurangnya informasi pasar dan kurangnya perlindungan konsumen. Jumlah pasar yang sudah direnovasi maupun yang belum, terdapat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Kondisi dan Jumlah Pasar yang ada di Kabupaten Enrekang.

No.	Nama Pasar	Jumlah Lods/Kios	Tempat	Keterangan
1.	Pasar Sentral Enrekang	723 Petak	Kec. Enrekang	
2.	Pasar Sentral Sudu	800 Petak	Kec. Alla	
3.	Pasar Sentral Cakke	222 Petak	Kec. Anggeraja	K.17,L.73,G.132
4.	Pasar Citra Baraka	236 Petak	Kec. Baraka	3 unit Lods, Perlu rehab 72 petak L.132,K.27,G.30

5.	Pasar Sentral Maroangin	189 Petak	Kec. Maiwa	
6.	Pasar Kabere		Kec. Cendana	
7.	Pasar Bungin/Pasar Desa	-	Kec. Bungin	
8.	Pasar Lebani/Pasar Desa	-	Kec. Maiwa	
9.	Pasar Tempe-tempe/ Pasar Desa	- -	Kec. Maiwa	
10.	Pasar Temban/ Pasar Desa	62 Petak	Kec. Enrekang	K.18,L.24
11.	Pasar Kotu/ Pasar Desa	42 Petak	Kec. Anggeraja	L.28,G.34 Lokasi 2 Unit
12.	Pasar Banti/ Pasar Desa	62 Petak	Kec. Baraka	
13.	Pasar Curio/ Pasar Desa	-	Kec. Curio	Lokasi Ada
14.	Pasar Dalle di Benteng Alla	-	Kec. Baroko	
15.	Pasar lo'ko desa Buntu Sarong	24 Petak	Kec. Masalle	
16.	Pasar Parombean/ Pasar Desa	-	Kec. Curio	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Enrekang (KUPERINDAG)

Dari jumlah pasar yang ada di Kabupaten Enrekang termasuk pasar pedesaan sekarang masih terdapat pasar yang perlu direnovasi atau rehab yaitu sebagai berikut.

1. Pasar Sentral Enrekang sudah baik dan telah ditempati, kekurangannya berupa Lods penjual ayam belum ada, lokasi sudah siap dan rencananya akan dibangun.
2. Pasar Sentral Sudu kondisinya baik dan siap untuk dimanfaatkan oleh para pedagang sesuai dengan fungsinya dan kekurangannya masih butuh

fasilitas berupa warung yang rencananya akan dibangun disekitar terminal pasar.

3. Pasar Sentral Cakke kondisinya sangat memprihatinkan karena usianya +- 62 tahun sehingga perlu direhab total, usul rehab telah dilakukan sejak tahun 2006 namun hingga sekarang belum juga terwujud.
4. Pasar Citra Baraka kondisinya sudah lumayan baik namun masih membutuhkan perbaikan baik di dalam pasar maupun diluar pasar (terminal).
5. Pasar Sentral Maroangin kondisi masih tergolong baik, harapan ke depan agar gardu yang ada dapat direhab.
6. Pasar Kabere Kecamatan Cendana kondisi fisiknya sudah tidak layak huni khususnya toko/lods yang berada di bagian depan, harapan pada tahun-tahun mendatang dapat diprioritaskan untuk direhab.
7. Pasar Kotu adalah pasar tradisional yang berada di Kotu Kecamatan Anggeraja dengan fasilitas kios/toko 18 buah lods 24 buah. Fasilitas tersebut di atas belum memadai sehingga ke depan masih perlu mendapat perhatian untuk dibangun guna penyempurnaannya seperti MCK, Musholla dan Lods (lokasi merupakan aset daerah).
8. Pasar Temban dan Banti fasilitasnya masih sangat terbatas sehingga harapan ke depan juga dapat diusulkan untuk dibangun, lokasi masih sangat memungkinkan untuk pengembangannya.
9. Pasar Curio lokasinya sudah ada, kiranya dapat pula diprioritaskan untuk dibangun.
10. Dan pasar-pasar desa yang lainnya dibangun di atas lokasi masyarakat atau pemda, bangunannya rata-rata terbuat dari kayu dan bambu yang bersifat sementara serta pengelolaannya sepenuhnya ditangani oleh Pemerintahan Desa atau kelompok-kelompok masyarakat desa.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dapat digambarkan hasil penelitian sebagai berikut.

5.1 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang

Implementasi merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu juga merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang, harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, aparat yang terlibat dalam pemungutan retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang serta hambatan atau kendala yang dihadapi pada saat pemungutan retribusi pasar. Beberapa hal yang telah disebutkan di atas perlu diketahui agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi.

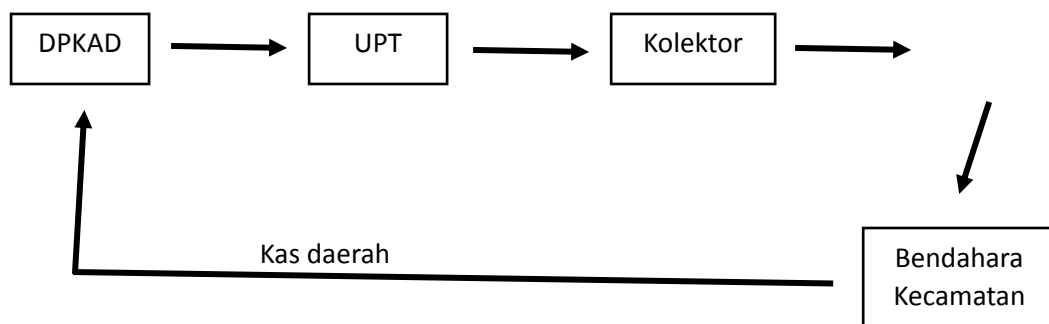
Sesuai dengan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 46 A tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemanfaatan dan Penertiban Pasar Sentral Enrekang, Pasar Sentral Sudu, dan Pasar Sentral Baraka serta Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar.

Tugas dan tanggung jawab tim yang dimaksud pada keputusan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengkoordinasikan penempatan pedagang pada fasilitas pasar dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut.

- a. Mengutamakan dan memprioritaskan pedagang lama yang telah menempati Toko, Kios, dan Lods sebelumnya pada tempat sesuai jenis jualan.
 - b. Pedagang baru, akan ditempatkan pada Toko, Kios, dan Lods setelah penempatan pedagang lama terpenuhi.
2. Mengelompokkan pedagang yang ada dalam pasar sesuai dengan jenis usaha/jualan.
 3. Menertibkan para pedagang yang tidak memanfaatkan fasilitas secara maksimal.
 4. Mengevaluasi pengguna pasar terhadap hak, kewajiban, dan larangan penggunaan pasar sesuai Peraturan Bupati Enrekang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pendistribusian Toko, Kios, Lods Pasar di wilayah Kabupaten Enrekang.
 5. Membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dan penertiban pasar kepada Bupati untuk bahan kebijakan lebih lanjut.

Demi pemaksimalan pemungutan retribusi, maka untuk menertibkan pedagang di dalam pasar Kabupaten Enrekang, Pemertintah Daerah mengeluarkan surat perjanjian kesepakatan kepada pedagang. Adapun UPT dan mekanisme pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang sebagai berikut.



Pemungutan retribusi pasar dikelola oleh UPT dibantu oleh petugas lapangan dalam hal ini kepala pasar, satpam, kolektor, dan pembersih pasar. UPT menyalurkan benda berharga berupa karcis, penetapan retribusi pasar dari Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah kemudian diserahkan kepada kolektor yang menagih langsung kepada wajib retribusi. Hasil tagihan kolektor akan diserahkan ke UPT. Pada akhir bulan selanjutnya disetor kepada Bendahara Penerima di Kecamatan untuk disetor ke kas daerah.

5.1.1 Aparat yang terlibat dalam pemungutan retribusi pasar

Implementasi merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu juga merupakan suatu kegiatan untuk merealisasikan program kerja yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 03 Tahun 2002 tentang pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) pengelola pasar dinas perindustrian dan perekonomian rakyat Kabupaten Enrekang, maka di bawah ini rincian mengenai tugas setiap bagian UPT pengelola pasar Kabupaten Enrekang. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut.

Kepala UPT mempunyai tugas:

1. Memimpin UPT dalam melaksanakan tugas dan kebijakan Kepala Dinas untuk peningkatan pengelolaan pasar;
2. Menyusun rencana teknis peningkatan pengelolaan pasar;
3. Bertanggungjawab dalam pembinaan tugas-tugas Kepala Pasar, Kolektor, Satpam Pasar dan Tenaga Kebersihan Pasar;

4. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan penerimaan Retribusi Pasar dan Retribusi Pangkalan Hasil Bumi;
5. Melaksanakan pendistribusian karcis pasar terdiri dari karcis model DPD 12 dan DPD 13 kepada kolektor pasar;
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Kepala Pasar, Satpam, Kolektor dan Tenaga Kebersihan Pasar dalam rangka mencapai hasil pelaksanaan tugas yang optimal;
7. Bertanggungjawab membuat laporan bulanan dan tahunan tentang hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
8. Menginventarisir berbagai permasalahan yang dihadapi dan mencari jalan pemecahan untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Petugas Lapangan mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Kepala Pasar adalah:
 - 1) Menertibkan para pedagang baik yang menempati lods, kios dan gardu pasar maupun pedagang yang menggunakan pelataran pasar;
 - 2) Menjaga dan memelihara kebersihan dalam lingkungan pasar;

- 3) Mendampingi kolektor dalam melaksanakan penagihan retribusi pasar;
 - 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh UPT.
2. Satpam Pasar adalah:
- 1) Menjaga dan memelihara keamanan dan keutuhan fasilitas pasar;
 - 2) Mewujudkan keadaan yang kondusif bagi keamanan lingkungan pasar;
 - 3) Melakukan pembinaan kepada pedagang dan penunjang pasar untuk mengamankan barang jualan/barang yang dibelinya;
 - 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPT.
3. Tugas Kolektor adalah:
- 1) Melakukan penagihan dan pemungutan atas Retribusi Pasar dan Retribusi Pangkalan Hasil Bumi;
 - 2) Bertanggungjawab dalam penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar dan retribusi pangkalan hasil bumi sesuai prosedur yang berlaku;
 - 3) Bertanggungjawab atas kelancaran pelaporan mengenai hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
 - 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPT.

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Pengelola Pasar Dinas Perindustrian dan

Perekonomian Rakyat Daerah

Kabupaten Enrekang

KEPALA UPT

54



Adapun jumlah pegawai yang digunakan dalam struktur organisasi Unit

Pelaksana Teknis sebagai berikut.

1. Kecamatan Enrekang

a. Pasar Enrekang

UPT : 1 Orang

Kepala Pasar : 1 Orang

Kolektor Pasar : 6 Orang

Satpam Pasar : 3 Orang

Petugas Kebersihan : 5 Orang

b. Pasar Temban

Kolektor Pasar : 1 Orang

Petugas Kebersihan : 1 Orang

2. Kecamatan Anggeraja

a. Pasar Cakke

UPT : 1 Orang

Kepala Pasar : 1 Orang

Kolektor Pasar : 6 Orang

Satpam Pasar : 3 Orang

- | | | |
|----|--------------------|-----------|
| | Petugas Kebersihan | : 2 Orang |
| b. | Pasar Kotu | |
| | Kolektor Pasar | : 2 Orang |
| | Petugas Kebersihan | : 1 Orang |
| 3. | Kecamatan Baraka | |
| a. | Pasar Baraka | |
| | UPT | : 1 Orang |
| | Kepala Pasar | : 1 Orang |
| | Kolektor Pasar | : 6 Orang |
| | Satpam Pasar | : 4 Orang |
| | Petugas Kebersihan | : 5 Orang |
| b. | Pasar Banti | |
| | Kolektor Pasar | : 1 Orang |
| | Petugas Kebersihan | : 1 Orang |
| 4. | Kecamatan Alla' | |
| a. | Pasar Sudu | |
| | UPT | : 1 Orang |
| | Kepala Pasar | : 1 Orang |
| | Kolektor Pasar | : 6 Orang |
| | Satpam Pasar | : 5 Orang |
| | Petugas Kebersihan | : 5 Orang |
| 5. | Kecamatan Maiwa | |
| a. | Pasar Maroangin | |
| | UPT | : 1 Orang |
| | Kepala Pasar | : 1 Orang |
| | Kolektor Pasar | : 6 Orang |

Satpam Pasar : 4 Orang

Petugas Kebersihan : 5 Orang

6. Kecamatan Cendana

a. Pasar Kabere

Kolektor Pasar : 1 Orang

Petugas Kebersihan : 1 Orang

7. Kecamatan Masalle

a. Pasar Masalle

Kepala Pasar : 1 Orang

Kolektor Pasar : 1 Orang

Petugas Kebersihan : 1 Orang

Berkenaan dengan siapa yang terlibat dalam pelaksanaa pemungutan retribusi pasar, hasil wawancara dengan Kepala Pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bpk Kadir yang merupakan salah satu aktor dari pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang.

“Pada tahun 2002, saat pengalihan pemungutan retribusi pasar ke Dinas KUPERINDAG, maka Dinas KUPERINDAG membentuk UPT di setiap kecamatan. Adapun UPT dalam pemungutannya dibantu oleh petugas lapangan.”(Wawancara, 24 April 2013)

Dari wawancara di atas dengan pengelola pasar, maka dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang yaitu pengelola pasar dan Unit Pelaksana Teknis di tiap kecamatan yang masing-masing memiliki struktur organisasi tersendiri.

5.1.2 Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang

Fasilitas yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui ada atau tidaknya fasilitas yang di butuhkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bpk Kadir mengatakan sehubungan dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaksana dalam pemungutan retribusi ini.

“Adapun fasilitas yang digunakan hanya karcis, kemudian kolektor menggunakan karcis dua macam. Yang pertama karcis harian yang dikenakan kepada para pedagang kemudian yang kedua karcis bulanan yang pengenaannya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.”(Wawancara, 24 April 2013)

5.1.3 Besarnya tarif retribusi di Kabupatern Enrekang

Mengenai besar tarif yang dibebankan terhadap wajib retribusi pasar disesuaikan dengan jenis fasilitasnya yang terdiri dari Toko, Kios, Lods & Gardu sudah diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 28 Desember 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka disampaikan kepada para Wajib Retribusi bahwa tarif Retribusi Pasar mengalami perubahan sesuai ketentuan pasal dengan rincian sebagai berikut.

I Pasar Kelas I (Enrekang, Baraka, Sudu dan Cakke)

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Kios | Rp. 3.500,-/m2/bulan |
| 2. Lods/Gardu | Rp. 2.500,-/m2/bulan |
| 3. Pelataran | Rp. 1.500,-/hari pasar |

II Pasar Kelas II (Pasar Maroangin)

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Kios | Rp. 3.500,-/m2/bulan |
| 2. Lods/Gardu | Rp. 2.500,-/m2/bulan |
| 3. Pelataran | Rp. 1.500,-/hari pasar |

III Pasar Kelas III (Kotu, Kabere, Temban, Banti, Lo'ko, Buntu Dama dan Maliba)

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Kios | Rp. 3.500,-/m2/bulan |
| 2. Lods/Gardu | Rp. 2.500,-/m2/bulan |
| 3. Pelataran | Rp. 1.500,-/hari pasar |

Sehubungan dengan tarif retribusi pasar, hasil wawancara dengan Kepala Pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bpk Kadir mengatakan bahwa.

“Dalam pemungutan retribusi, hanya menggunakan karcis pasar yang tercantum nominalnya Rp. 1000,- yang dipungut kolektor setiap hari kepada wajib retribusi.”(Wawancara, 24 April 2013)

5.1.4 Faktor-faktor penunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang

Agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka sangat diperlukan Faktor-faktor penunjang. Faktor-faktor penunjang yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat membantu atau mendukung terlaksananya sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bpk Kadir, sehubungan dengan Faktor-faktor penunjang pelaksanaan kebijakan ini, menjelaskan bahwa

“Di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar faktor penunjangnya adalah kepala pasar dapat mendampingi kolektor dalam melakukan pemungutan kepada wajib retribusi.” (Wawancara, 24 April 2013)

“Kemudian setiap 1 kali setahun Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan melakukan uji petik setiap pasar untuk melihat kondisi pasar. Pada saat kepala pasar mendampingi kolektor, penerimaan retribusi pasar melebihi target dibandingkan pada saat tidak didampingi oleh kepala pasar penerimaan kurang dari target”.

“Selanjutnya terkadang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah juga melakukan uji petik namun tidak bersamaan harinya dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan”. (Wawancara, 02 Juni 2013)

Dari wawancara di atas dengan pengelola pasar, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penunjang pemungutan retribusi adalah kepala pasar yang mendampingi kolektor dalam memungut retribusi kepada wajib retribusi. Kemudian dilakukan uji petik untuk memeriksa keadaan pasar, terkadang juga Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dalam melakukan uji petik yang juga dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan tidak ada koordinasi sebelumnya yang pada dasarnya akan tumpang tindih dalam pengawasan pengelolaan pasar.

5.1.5 Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut bukan berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang bisa saja

terjadi sehingga menimbulkan pemungutan retribusi pasar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang.

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini, hasil wawancara dengan Kepala Pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bpk Kadir menyatakan bahwa:

“Karena pedagang yang menempati tempat strategis memang rajin membayar, namun tempat-tempat di pasar tradisional ada yang tidak dikunjungi orang karena lokasinya yg agak kedalam. Kemudian salah satu juga ketika penjual melihat kolektor datang pedagang biasa meninggalkan jualannya dan setelah diberlakukannya Perda nomor 9 karena kenaikannya yang signifikan yang dulunya cuma Rp10.000 sekarang bisa mencapai 30.000 sementara ini harus diberlakukan karena sudah ditetapkan daerah.” (Wawancara, 24 April 2013)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini adalah:

1. Lokasi tempat berjualan yang tidak strategis sehingga kurang pengunjung yang datang.
2. Kesadaran pedagang untuk membayar retribusi masih kurang.

5.2 Kontribusi Retribusi Pasar Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang, salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan

melihat perbandingan antara target dan realisasi. Apabila target terpenuhi secara maksimal (100%) berarti sesuai yang diharapkan akan tetapi jika belum mencapai target maka penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang belum berhasil.

Retribusi pasar di Kabupaten Enrekang dalam pengelolaannya dilakukan metode anggaran berbasis kecamatan sehingga untuk lebih efektifnya, maka dikelompokkan pasar berdasarkan kecamatan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Klasifikasi Pasar Berdasarkan Kecamatan

1. Kecamatan Enrekang

Uraian	Kecamatan Enrekang		
	Enrekang	Temban	Total
Nama Pasar	Enrekang	Temban	Total
Jumlah Pegawai	16	2	18
Anggaran/orang	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
Jumlah Lods	688	62	750
Jumlah Kios	195	-	195
Jumlah Gardu	-	10	10
Total Anggaran	Rp. 7.200.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 8.100.000,-
Anggaran Untuk Lods	Rp. 4.548.096,-	Rp. 626.994,-	-
Anggaran Untuk Kios	Rp. 2.651.904,-	-	-
Anggaran Untuk Gardu	-	Rp. 273.006,-	-

2. Kecamatan Anggeraja

Uraian	Kecamatan Anggeraja
--------	---------------------

Nama Pasar	Cakke	Kotu	Total
Jumlah Pegawai	13	3	16
Anggaran/orang	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
Jumlah Lods	240	18	258
Jumlah Kios	335	24	359
Jumlah Gardu	-	10	10
Total Anggaran	Rp. 5.850.000,-	Rp. 1.350.000,-	Rp. 7.200.000,-
Anggaran Untuk Lods	Rp. 925.000,-	Rp. 623.025,-	-
Anggaran Untuk Kios	Rp. 3.166.605,-	Rp. 467.370,-	-
Anggaran Untuk Gardu	-	Rp. 259.605,-	-

3. Kecamatan Baraka

Uraian	Kecamatan Baraka		
	Baraka	Banti	Total
Nama Pasar	Baraka	Banti	Total
Jumlah Pegawai	17	2	19
Anggaran/orang	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
Jumlah Lods	196	28	224
Jumlah Kios	40	-	40
Jumlah Gardu	53	34	87
Total Anggaran	Rp. 7.650.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 8.550.000,-
Anggaran Untuk Lods	Rp. 5.188.230,-	Rp. 406.440-	-
Anggaran Untuk Kios	Rp. 1.058.760,-	-	-
Anggaran Untuk Gardu	Rp. 1.403.010-	Rp. 493.560-	-

4. Kecamatan Alla'

Uraian	Kecamatan Alla'		
	Sudu	-	Total
Nama Pasar	Sudu	-	Total
Jumlah Pegawai	18	-	18
Anggaran/orang	Rp. 450.000,-	-	Rp. 450.000,-
Jumlah Lods	628	-	628
Jumlah Kios	240	-	240
Jumlah Gardu	-	-	-
Total Anggaran	Rp. 8.100.000,-	-	Rp. 8.100.000,-
Anggaran Untuk Lods	Rp. 5.860.350,-	-	-
Anggaran Untuk Kios	Rp. 2.239.650,-	-	-
Anggaran Untuk Gardu	-	-	-

5. Kecamatan Cendana

Uraian	Kecamatan Enrekang		
	Kabere	-	Total
Nama Pasar	Kabere	-	Total
Jumlah Pegawai	2	-	2
Anggaran/orang	Rp. 450.000,-	-	Rp. 450.000,-
Jumlah Lods	28	-	29
Jumlah Kios	14	-	14
Jumlah Gardu	18	-	18
Total Anggaran	Rp. 900.000,-	-	Rp. 900.000,-
Anggaran Untuk Lods	Rp. 420.030,-	-	-
Anggaran Untuk Kios	Rp. 209.970,-	-	-
Anggaran Untuk Gardu	Rp. 270.000,-	-	-

6. Kecamatan Maiwa

Uraian	Kecamatan Enrekang		
Nama Pasar	Maroangin	-	Total
Jumlah Pegawai	8	-	8
Anggaran/orang	Rp. 450.000,-	-	Rp. 450.000,-
Jumlah Lods	132	-	132
Jumlah Kios	27	-	27
Jumlah Gardu	30	-	30
Total Anggaran	Rp. 3.600.000,-	-	Rp. 3.600.000,-
Anggaran Untuk Lods	Rp. 2.514.240,-	-	-
Anggaran Untuk Kios	Rp. 514.440,-	-	-
Anggaran Untuk Gardu	Rp. 571.320,-	-	-

7. Kecamatan Masalle

Uraian	Kecamatan Enrekang		
Nama Pasar	Masalle	-	Total
Jumlah Pegawai	3	-	3
Anggaran/orang	Rp. 450.000,-	-	Rp. 450.000,-
Jumlah Lods	24	-	24
Jumlah Kios	16	-	16
Jumlah Gardu	180	-	180
Total Anggaran	Rp. 1.350.000,-	-	Rp. 1.350.000,-
Anggaran Untuk Lods	Rp. 98.145,-	-	-
Anggaran Untuk Kios	Rp. 147.285,-	-	-
Anggaran Untuk Gardu	Rp. 1.104.570,-	-	-

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

Untuk kecamatan yang tidak memiliki UPT seperti Kecamatan Cendana dan Masalle, jadi karena di pasar kabere cuma ada kolektor dengan petugas

pembersih maka langsung saja kolektor yang menyeter ke bendahara penerima di kecamatan. Sedangkan untuk pasar masalle karena yang ada kepala pasar, kolektor, dan petugas pembersih maka kepala pasar yang akan melakukan penyeteran kepada bendahara penerimaan di kecamatan.

Implementasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik atau tidak serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan retribusi pasar per Kecamatan di Kabupaten Enrekang:

Tabel 5.2
Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar Per Kecamatan
Kabupaten Enrekang dari Tahun 2007-2011

Tahun	Kecamatan Alla		%	Kecamatan Baraka		%	Kecamatan Maiwa		%	Kecamatan Cendana		%	Kecamatan Anggeraja		%	Kecamatan Enrekang		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2007	98.750.000	92.657.000	93,83	89.500.000	82.738.000	92,44	17.440.000	12.631.000	72,42	9.108.000	8.895.000	97,66	234.000.000			75.969.800	32,46	
2008	98.750.000	82.571.000	83,62	89.500.000	79.503.000	88,83	17.440.000	11.781.000	67,55	9.108.000	7.675.000	84,27	234.000.000			81.709.000	34,92	
2009	98.750.000	94.235.000	95,43	89.500.000	89.775.999	100,31	17.440.000	11.370.000	65,19	9.108.000	9.225.000	101,28	30.500.000	46.826.000	153,52	118.087.619	107.506.619	91,04
2010	98.750.000	72.468.000	73,38	89.500.000	89.507.000	100,01	12.436.000	12.761.000	102,61	9.108.000	10.385.000	114,02	30.500.000	44.123.000	144,66	107.022.619	147.513.619	137,83
2011	98.750.000	101.629.500	102,91	89.500.000	96.692.000	108,03	12.436.000	16.808.000	135,15	9.108.000	10.937.000	120,08	30.500.000	34.014.000	111,52	107.022.619	121.453.000	113,48

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)

Dari data dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang setiap kecamatan, pada tahun 2007 ada 3 kecamatan yang memperoleh target hampir terpenuhi yaitu Alla, Baraka dan Cendana masing-masing terealisasi 93,83%, 92,44% dan 97,66% sedangkan Maiwa hanya 72,42%. Sedangkan untuk Anggeraja dan Enrekang target dan realisasinya disatukan masing-masing 32,46%. Untuk tahun 2008 masing-masing kecamatan Alla, Baraka, Maiwa dan Cendana mengalami penurunan 10,21%, 3,61%, 4,87% dan 13,39% realisasinya 83,62%, 88,83%, 67,55% dan 84,27%, sedangkan Anggeraja dan Enrekang yang 2 tahun berturut-turut target dan realisasinya disatukan mengalami kenaikan 2,46% dengan realisasi 34,92%.

Untuk tahun 2009 ada dua kecamatan yang targetnya terpenuhi yaitu Cendana dan Baraka dengan kenaikan 36,12% dan 17,01% realisasinya 100,31% dan 101,28%. Untuk kecamatan Alla juga mengalami kenaikan 11,81% dengan realisasi 95,43%. Sedangkan kecamatan Anggeraja dan Enrekang yang tahun ini telah dipisah target dan realisasinya, Kecamatan Anggeraja yang targetnya terpenuhi 153,52% dan untuk Kecamatan Enrekang 91,04%.

Untuk tahun 2010, ada 5 kecamatan yang targetnya telah terlampaui namun berdasarkan jumlah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Kecamatan Maiwa, Cendana dan Enrekang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 37,42%, 12,74%, dan 46,79% dengan realisasi 102,61%, 114,02% dan 137,83%. Untuk Kecamatan Baraka dan Anggeraja mengalami penurunan 0,30% dan 8,96% realisasinya 100,01% dan 137,83%. Sedangkan untuk Kecamatan Alla mengalami penurunan 22,05% realisasinya 73,38%.

Untuk tahun 2011, seluruh Kecamatan mencapai target yang direncanakan. 4 Kecamatan yang mengalami kenaikan yaitu Alla, Baraka, Maiwa dan Cendana kenaikannya masing-masing 29,53%, 8,02%, 32,54% dan 6,06%

dengan realisasi 102,91%, 108,03%, 135,15% dan 120,08%. Sedangkan untuk Anggeraja dan Enrekang mengalami penurunan 33,14% dan 24,35% realisasinya 111,52% dan 113,48%.

Penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang di tiap Kecamatan lima tahun terakhir cukup prospek untuk dikembangkan agar bisa memberikan kenaikan terhadap PAD di Kabupaten Enrekang. Berikut target dan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Enrekang:

Tabel 5.3
Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar
Kabupaten Enrekang dari Tahun 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2007	448.798.000	272.890.800	60,80
2008	448.798.000	333.911.000	74,40
2009	378.505.619	369.932.999	97,74
2010	377.556.619	403.317.000	106,82
2011	377.556.619	420.798.500	111,45

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)

Dari data dapat dilihat bahwa pada dasarnya tiap tahunnya mengalami kenaikan. Dimulai tahun 2007 tidak memenuhi target yang telah ditentukan, realisasinya hanya mencapai 60,80%. Kemudian tahun 2008 mengalami kenaikan tapi kenaikannya hanya 13,60% dan realisasinya 74,40%. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 23,34%, realisasinya 97,74%. Kemudian tahun berikutnya 2010 telah memenuhi target yang ditentukan namun dengan kenaikan sebesar 9,08%, realisasinya 106,82%. Kemudian tahun 2011 lebih besar dari tahun sebelumnya juga melebihi target dengan kenaikan 4,63%, realisasinya 111,45%.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bpk Kadir, sehubungan dengan retribusi pasar yang akan dijadikan sebagai penerimaan daerah untuk mengukur kemandirian daerah tanpa harus bergantung dari Pemerintah Pusat.

“Retribusi pasar belum bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah karena 17 pasar yang ada di Kabupaten Enrekang pengelolaannya masih tradisional dan dikelola oleh desa atau LKMD sehingga pendapatannya masih minim.”(Wawancara, 24 April 2013)

Untuk mengetahui sumbangan atau kontribusi pasar per kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Kontribusi Retribusi Pasar Per Kecamatan Terhadap Total Retribusi Daerah di
Kabupaten Enrekang dari Tahun 2007-2011

Tahun	Retribusi Pasar Per Kecamatan						Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang	Kontribusi (%)
	Alla	Baraka	Maiwa	Cendana	Anggeraja	Enrekang		
2007	92.657.000	82.738.000	12.631.000	8.895.000	75.969.800		4.769.188.907	5,72%
2008	82.571.000	79.503.000	11.781.000	7.675.000	81.709.000		7.449.146.747	4,48%
2009	94.235.000	89.775.999	11.370.000	9.225.000	46.826.000	107.506.619	3.868.922.234	9,56%
2010	72.468.000	89.507.000	12.761.000	10.385.000	44.123.000	147.513.619	5.199.718.989	7,76%
2011	101.629.500	96.692.000	16.808.000	10.937.000	34.014.000	121.453.000	3.820.111.363	11,01%

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar per Kecamatan terhadap retribusi daerah dari tahun 2007-2011 mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, kontribusi retribusi pasar mencapai 5,72%. Sedangkan untuk tahun 2008 kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah menurun menjadi 4,48%. Namun pada tahun 2009 mengalami kenaikan dan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 9,56%. Selanjutnya untuk tahun 2010 penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah mengalami penurunan sehingga menjadi 7,76%. Pada tahun 2011 kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah mengalami kenaikan sehingga mencapai 11,01%.

Selanjutnya dapat dilihat besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.5
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Total Penerimaan di
Kabupaten Enrekang dari Tahun 2007-2011

Tahun	Retribusi Pasar Kabupaten Enrekang	Total PAD	Kontribusi (%)
2007	272.890.800	23.150.378.237,45	1,18%
2008	333.911.000	30.588.438.640,50	1,09%
2009	369.932.999	28.375.784.091,31	1,30%
2010	403.317.000	19.489.989.556,92	2,07%
2011	420.798.500	18.486.974.116,91	2,28%

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Enrekang terhadap pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami kenaikan hanya pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,09%. Pada tahun 2007 penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

sebesar 1,18%. Selanjutnya pada tahun 2008 penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun yaitu sebesar 1,09%. Untuk tahun 2009 penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat yaitu sebesar 1,30%, pada tahun 2010 penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat lagi yaitu sebesar 2,07% dan untuk tahun 2011 penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,28%. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dari tahun 2007-2011 mengalami kenaikan sebesar rata-rata 1,58%. Namun total PAD juga mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir, jadi dalam hal ini kontribusi retribusi pasar terhadap total PAD Kabupaten Enrekang sudah berhasil.

Penerimaan retribusi pasar sangat menunjang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pada dasar penerimaan retribusi pasar cenderung mengalami kenaikan. Namun hal ini juga diiringi pula dengan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

5.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang

Dalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi implementasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang, antara lain sebagai berikut.

1. Fasilitas pasar yang masih belum memadai, ini bisa ditemukan pada pasar kelas II dan III sehingga keinginan masyarakat untuk membeli juga berkurang.

2. Pedagang yang menempati tempat agak terpencil jauh dari penjual ikan dan sayur, memang pengunjung pasar jarang ke tempat tersebut sehingga pemilik tempat jarang membuka tempat jualannya berdampak pada sulitnya kolektor melakukan penagihan.
3. Kesadaran pedagang untuk membayar retribusi kurang sehingga penerimaan retribusi pasar minim. Ketika diancam untuk meninggalkan tempatnya, malah mereka mengatakan itu lebih baik dari pada bertahan dan tidak mendapatkan penghasilan.
4. Faktor sumber daya manusia dalam hal ini kolektor yang akan melakukan pemungutan tidak komunikatif sehingga berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk membayar retribusi pasar.
5. Transaksi para pedagang yang terjadi di luar pasar, seperti di kebun masing-masing sehingga mengurangi penerimaan retribusi karena langsung diangkut dari kebun ke lokasi pembeli tidak lagi ke pasar.
6. Ada 17 pasar tradisional di Kabupaten Enrekang, hanya 10 pasar yang dikelola pendapatannya oleh Pemerintah Daerah, 7 diantaranya masih dikelola oleh Desa atau LKMD.
7. Pengelolaan pasar juga masih tradisional sehingga pendapatan retribusinya masih minim karena pasar hanya ramai pada saat hari-hari tertentu misalnya pada tanggal 1-10 setiap bulan dan musim buah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a) Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang selama tahun 2007-2011.

Sistem dan mekanisme pelaksanaan pemungutan pasar belum optimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi pasar adalah UPT yang telah di SK-kan oleh Bupati pada setiap kecamatan serta bekerja sama dengan dinas yang terkait. Fasilitas yang digunakan oleh para petugas dalam melaksanakan pemungutan adalah karcis yang diserahkan kepada wajib retribusi sebagai bukti telah membayar retribusi pasar, mudah disalah gunakan.

Dalam pemungutan hanya menggunakan karcis pasar yang tercantum nominalnya Rp. 1000,- yang dipungut kolektor setiap hari kepada wajib retribusi. Kepala pasar tidak mendampingi kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi, serta tidak ada koordinasi lebih lanjut terkait uji petik antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

b) Kontribusi retribusi pasar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dari tahun 2007-2011 mengalami kenaikan sebesar rata-rata 1,58%. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel 5.5 bahwa hanya pada tahun 2008 mengalami penurunan 0,09% dari tahun sebelumnya tahun 2007. Namun tiga tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan dan kalau kenaikan tiap tahunnya bisa dipertahankan maka akan menambah lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari perolehan retribusi pasar.

c) Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang.

Fasilitas yang belum memadai sehingga minat masyarakat untuk ke pasar berkurang seperti: WC, tidak ada tempat berteduh, kondisi jalan di dalam pasar yang belum memadai. Tempat parkir yang tidak terurus dengan baik sehingga masyarakat kurang minat ke pasar. Lokasi tempat berjualan yang tidak strategis mengakibatkan turunnya minat membayar retribusi pasar.

Faktor sumber daya manusia yang belum memadai pada saat melakukan pemungutan retribusi pasar. Adanya transaksi di lokasi pertanian berakibat tidak masuknya hasil bumi ke pasar. Pengelolaan pasar yang masih tradisional.

Namun keseluruhan faktor yang ada tidak bisa dipisahkan karena saling terhubung antara satu sama lain, maka penyelesaiannya juga harus bertahap.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan yang nantinya dapat menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, antara lain sebagai berikut.

1. Untuk lebih optimalnya kedepan, maka sistem dan mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Untuk fasilitas petugas dalam hal ini karcis yang digunakan untuk menarik pembayaran, agar didesain sedemikian rupa sehingga tidak mudah disalahgunakan.
3. Kepala pasar mendampingi kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pasar, serta harus ada koordinasi lebih lanjut terkait uji petik antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
4. Untuk jenis pasar kelas II dan III agar lebih diperhatikan fasilitas yang belum ada agar masyarakat puas terhadap pelayanan pemerintah.
5. Untuk lebih maksimalnya pemungutan maka diusahakan kolektor bisa lebih komunikatif pada saat melakukan penagihan.
6. Pengelolaan pasar yang dulunya tradisional agar digunakan metode lain sehingga petani tidak lagi melakukan transaksi di luar pasar.
7. Untuk peneliti berikut dapat melanjutkan penelitian ini dengan metode penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswin, R. H. 24 Oktober 2011. Jaminan Pasar bagi Petani Enrekang, (online), (<http://jaminanpasarbagipetanienrekang.KOMPAS.com.html>, diakses 20 Februari 2013).
- Bratakusumah, D. S. dan D. Solihin. 2003. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah. 2007-2011. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang 2007-2011. DPKAD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 2007-2011. Pengelolaan Pasar 2007-2011. Kuperindag Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
- Elmi, B. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. UI-Press, Jakarta.
- Bird, R. M. dan F. Vaillancourt. 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang. A. Ulfa [penerjemah]. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Desk Informasi, Kemendag. 19 Februari 2013. Revitalisasi Pasar Cakke Dorong Promosi Produk Khas Lokal, (online), (<http://revitalisasipasarcakkedorongpromosiprodukhaslokal.kompas.com.html>, diakses 20 Februari 2013).
- Mankiw, N. G. 2003. Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Imam Nurmawan [penerjemah]. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemkab.Enrekang. 11 Mei 2013. Situs Resmi Kabupaten Enrekang, (online), (<http://enrekang.co.id>, diakses 11 Mei 2013).
- Rasyid, M. R. 2005. "Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa Depan". Dalam S. Haris [editor]. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press, Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Salamm, A. 2002. "Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah". Dalam S. Haris [editor]. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press, Jakarta.
- Saragih, J. P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, M. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Wikipedia Indonesia. 2007. Inflasi dan Pendapatan Nasional [Wikipedia Online]. <http://www.id.wikipedia.org>.
- Yanti, Z. Y. 2004. Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor [skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor, Bogor.